

---

# Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile Di Kota Pekanbaru (Studi Pada Ditlantas Polda Riau)

Maya Suttri<sup>1</sup>

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kharudin Nasution  
No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia  
mayasuttri@student.uir.ac.id

Received : April 20, 2024;

Accepted : 30 Juli 2024

## Abstract

*The research aims to find out how Mobile Electronic traffic Law Enforcement (Etle) in Pekanbaru city (Study of the Riau Police Traffic Directorate) and also to find out what are the inhibiting factors in implementing Mobile Electronic Traffic Law Enforcement (Etle). The indicators used include communication, research, methods. Data collection using interview, observation and documentation techniques. The result of the research show that the implementation of Mobile Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) in Pekanbaru city (Study at the Riau PoliceTraffic Directorate) can be said to be optimal.*

**Key Words : Implementation, Electronic, Socialization.**

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui Efektivitas Penyuluhan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile Di Kota Pekanbaru (Studi Pada Ditlantas Polda Riau) dan juga untuk mengetahui apa saja factor penghambat dalam pelaksanaan Elektronik Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile tersebut. Indikator yang digunakan meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap pelaksanaan, dan struktur birokrasi. Penelitian ini dilakukan di Ditlantas Polda Riau dengan menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Electronic Tilang Di Kota Pekanbaru (Studi Pada Ditlantas Polda Riau) dapat dikatakan maksimal.

**Key Words : Pelaksanaan, Elektronik, Sosialisasi.**

## Pendahuluan

System transportasi merupakan suatu hal yang paling penting bagi suatu kota, terutama dikota besar yang memiliki banyak aktivitas dan banyak penduduk. Selain itu system transportasi adalah hal yang krusial dalam menentukan keefektifan suatu kota. Banyak sekali kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh pemakai jalan yang cenderung mengakibatkan timbulnya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas yang semakin meningkat. Pelanggar lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran tidak menggunakan helm, menggunakan ponsel saat berkendara, tidak menggunakan sabuk pengaman, melanggar rambu atau marka jalan, hingga kendaraan yang melebihi batas kecepatan.

Pemahaman masyarakat tentang peraturan dalam berlalu lintas serta angkutan jalan raya masih kurang, sehingga perlu adanya usaha untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menambah wawasan masyarakat itu sendiri terdapat peraturan berkendara di jalan raya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar berkurangnya jumlah pelanggar di jalan raya.

Salah satu langkah perubahan dalam melancarkan dan menertibkan system pelayanan publik yaitu dengan melakukan gerakan perbaikan terhadap setiap pelayanan yang ada, salah satunya dengan perubahan system penilangan di jalan raya. Hal ini dikarenakan system tilang yang digunakan selama ini masih bersifat konvensional atau manual. Melalui kebijakan baru yaitu elektronik tilang diharapkan mampu memberikan pelayanan public yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam mewujudkan system birokrasi atau administrasi yang lebih baik dan lebih modern.

Cara penanganan proses pelanggaran pada tilang manual dengan elektronik tilang terletak pada bagaimana proses penilangan tersebut. Yang mana pada tilang manual polisi akan memberhentikan pelanggar lalu lintas dengan sopan dan santun dan menjelaskan apa kesalahan pengemudi sehingga mereka diberhentikan oleh petugas. Kemudian pelanggar akan diberikan surat tilang yang akan diurus ke pengadilan untuk membayar denda dari pelanggaran yang telah dilakukan, yang mana proses ini akan memakan waktu yang cukup lama dalam pengurusan tilang.

Pelaksanaan program elektronik tilang merupakan salah satu pelayanan dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi. Dalam pelaksanaan diharapkan agar proses pengurusan tilang lebih mudah untuk dilaksanakan. Pemakai jalan dan lalu lintas memiliki peran penting untuk suatu kepentingan Negara. Pemberitahuan dari pemerintah sangat dibutuhkan dengan tujuan untuk mewujudkan agar dalam berlalu lintas keselamatan, keamanan bagi para pelanggar dalam konsep berlalu lintas meliputi aspek pengendalian, penertiban, dan pengamatan berlalu lintas bertujuan untuk mewujudkan kelancaran lalu lintas serta kenyamanan, keselamatan, dan ketertiban.

Etle mobile handheld merupakan perangkat genggam yang berbasis teknologi informasi yang dirancang khusus untuk membantu petugas kepolisian dalam tugasnya. Alat ini memiliki kemampuan luar biasa dalam mendeteksi dan menindak pelanggaran lalu lintas dengan cepat dan efisien. Perangkat elektronik mobile handheld ini dapat memudahkan petugas kepolisian dalam proses penindakan. Alat ini terhubung langsung dengan pusat komando, sehingga data pelanggaran bias langsung terkirim dan digunakan sebagai bukti dalam proses hukum.

Sedangkan etle mobile on board adalah, kamera portable yang ada pada kendaraan Polantas yang bergerak di titik rawan yang tidak terjangkau kamera ETIE Statis. Merekam setiap pelanggaran lalu lintas yang ditemukan pada saat kendaraan polantas bergerak yang mampu menangkap (capture) para peanggar kecepatan dan pelanggar lainnya.

Adapun jenis pelanggaran yang terdeteksi oleh elektronik tilang yaitu :

1. Melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan
2. Tidak menggunakan sabuk keselamatan
3. Mengemudi sambil menggunakan Handphone
4. Melanggar batas kecepatan
5. Menggunakan pelat nomor palsu
6. Berkendara melawan arus
7. Menerobos lampu merah
8. Tidak menggunakan helm
9. Berboncengan lebih dari 3 orang
10. Tidak menyalakan lampu pada siang hari bagi sepeda motor Mekanisme Tilang

Elektronik tilang merupakan metode baru untuk penerapan disiplin berlalu lintas dengan menggunakan bukti foto kamera ETLE Mobile oleh petugas kepolisian. Yang mana diprioritaskan di area yang tidak terdapat kamera ETLE statis. Pelanggar akan difoto dengan ETLE Mobile oleh anggota Lantas yang memang sudah terlatih, dan foto pelanggar lalu lintas tersebut dapat dijadikan bukti di Pengadilan. Penerapan tilang dengan metode ini bertujuan untuk meningkatkan rasa disiplin berkendara pada masyarakat. Dan juga untuk meminimalisir oknum-oknum yang melakukan pemerasan saat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas.

Pada dasarnya pemberian tilang dan mekanisme sidang surat pembayaran tilang serupa dengan tilang biasa. Yang membedakan adalah adanya rekaman elektronik untuk merekam kesalahan pengemudi. Dalam pasal 272 UU LLAJ disebutkan bahwuntuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik, hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Adapun permasalahan yang peneliti temukan ialah Adanya masyarakat yang masih tidak mengetahui bahwa mereka adalah salah satu pelanggar elektronik tilang karena tidak mendapatkan surat konfirmasi ataupun notifikasi bahwa mereka terkena elektronik tilang sehingga terjadi kesulitan pada saat pembayaran pajak dilakukan oleh pelaku pelanggaran elektronik tilang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Elektronik Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile Di Kota Pekanbaru (Studi Pada Ditlantas Polda Riau), dan juga untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat Pelaksanaan Elektronik Tilang HandHeld Mobile Di Kota Pekanbaru (Studi Pada Ditlantas Polda Riau).

## **Tinjauan Pustaka**

**Penelitian Terdahulu terkait dengan penelitian tentang Pelaksanaan Tilang Elektronik (E-Tilang) Di Kota Pekanbaru**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Endah Syafitri, 2022	Efektivitas Implementasi Program Elektronik Traffic Law Enforcement (ETLE) Nasional Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Kota Pekanbaru.	Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menganalisis mengenai ETLE Mobile di Kota Pekanbaru. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek serta variabelnya yaitu penerapan sedangkan dalam penelitian ini variabelnya yaitu pelaksanaan.
2	Ardhea Mariza Putri, 2023	Efektivitas Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile Di Kota Pekanbaru	Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menganalisis mengenai ETLE MOBILE di Kota Pekanbaru. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek serta variabelnya yaitu penerapan sedangkan dalam penelitian ini variabelnya yaitu Pelaksanaan.
3	Michelle Adellina, 2023	Efektivitas Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement Terhadap Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di Kota Bandar Lampung)	Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menganalisis mengenai ETLE MOBILE. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek serta, variable dan lokasi penelitiannya. Yang mana subjek dari penelitian ini yaitu Pelaksanaan Di Kota Pekanbaru.
4	Septika Ayu Putri, 2022	Pelaksanaan Sosialisasi Program ETLE Sebagai Upaya Mewujudkan Budaya Tertib Lalu Lintas di Kota Pekanbaru.	Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menganalisis mengenai ETLE MOBILE di Kota Pekanbaru
5	Angeline Annabella Siahaan, 2022	Penerapan ETLE Titik H.R.Soebrantas Bagi Pelanggar Lalu Lintas Pengguna Hanphone Oleh Kendaraan Roda 4 di	Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menganalisis mengenai ETLE MOBILE, sedangkan perbedaannya terletak pada subjek dan variabelnya. Yang

Wilayah Hukum Polda mana variabelnya yaitu  
Riau pelaksanaan.

*Sumber : Modifikasi Penulis 2023*

Semua referensi yang dikutip dalam teks artikel harus ditulis di bagian bibliografi dan menggunakan gaya American Psychological Association (APA), disusun dari A hingga Z.

Seharusnya termasuk referensi yang diperoleh dari sumber utama (terdiri dari jurnal ilmiah sebesar 80% dari seluruh bibliografi) yang telah diterbitkan dalam 10 (sepuluh) terakhir tahun. 20% sisanya dapat mencakup artikel penelitian.

## **Metode**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian yang berdasarkan pada pengamatan penulis dilapangan dengan cara mengumpulkan data, mengklarifikasikan dan menganalisis sehingga diperoleh rumusan analisis terhadap permasalahan yang dihadapi. Kemudian dengan metode penelitian kualitatif, metode ini berusaha memberikan suatu gambaran mengenai keadaan dilapangan sehingga metode ini bertujuan mengakumulasi data berkala sehingga diperoleh kesimpulan dari penelitian

Menurut Sugiyono (2016:9), metode deskriptif kualitatif ialah metode penelitian yang didasarkan pada filosofi post-positivis yang digunakan untuk mempelajari keadaan objek alam dari pada eksperimen. Di sini, peneliti merupakan alat utama dari data. Suatu metode pengumpulan yang dilakukan dengan trigulasi (gabungan), analisis data yang bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Sesuai permasalahan penelitian ini, maka peneliti mengambil lokasi penelitian di Polda Riau. Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini yaitu karena segala pengurusan pelanggaran rambu lalu lintas atau bagian Ditlantas akan di proses dan di urus ke Polda Riau.

Untuk memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai masalah penelitian yang dibahas, oleh karena itu penulis menggunakan teknik informan. Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperluka selama proses penelitian. Berdasarkan uraian diatas, peneliti menentukan informan tidak dengan strata, pedoman, atau wilayah, akan tetapi berdasarkan tujuan tertentu yang berhubungan dengan masalah penelitian.

## **Hasil dan Pembahasan**

Table I

Data Pelanggaran Roda 2 Dari Macam Pelanggaran Elektronik Tilang Mobile  
HandHeld Di Kota Pekanbaru

BULAN	JENIS PELANGGARAN YANG DILAKUKAN					
	Helm	Pelat Nomor Palsu	Boncengan lebih + 1	Melaw-an arus	Guna HP	Jumlah GAR / Tilang
Januari	244	125	5	17	9	400
Februari	218	147	-	-	2	367
Maret	241	155	11	5	-	412
April	213	120	3	6	4	346
Mei	488	181	7	-	-	676
Juni	505	206	-	17	1	729
Juli	383	221	25	12	5	646
Agustus	515	307	28	18	11	879
September	422	268	7	-	4	701
Oktober	894	252	4	-	7	1.157
November	241	97	13	-	10	361
Desember	53	81	21	-	7	161
<b>JUMLAH</b>	<b>4.417</b>	<b>2.160</b>	<b>124</b>	<b>75</b>	<b>60</b>	<b>6.835</b>

Sumber : Ditlantas Polda Riau 2023

Dari table diatas, dapat dikatakan bahwa pemahaman mengenai ketertiban dalam hal berlalu lintas di Kota Pekanbaru sangat penting yaitu untuk menjamin keamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas. Untuk menegakkan ketertiban dalam berlalu lintas perlu adanya tilang yang dilakukan oleh petugas kepolisian khususnya Ditlantas Polda Riau. Hal ini dilakukan agar masyarakat Pekanbaru lebih memperhatikan dan meningkatkan ketertibannya dalam berlalu lintas. Selain itu untuk mendukung pelaksanaannya perlu diterapkan tilang yang berbasis elektronik tilang mobile (Etle Mobile) untuk memudahkan serta memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Dari data diatas yang diperoleh oleh peneliti, keseluruhan telah menetapkan prosedur elektronik tilang mobile (Etle Mobile) setiap tindakan dalam dalam penerapan penertiban dan pengawasan lalu lintas yang dilaksanakan. Dari proses tindakan sampai pembayaran telah menggunakan metode elektronik tilang.

Pada pelaksanaan penelitian yang penulis lakukan dilapangan tentang Pelaksanaan Elektronik Tilang di Kota Pekanbaru Studi Pada (Ditlantas Polda Riau), yang bertugas penting dalam penyempurnaan hasil penelitian ini adalah informan yang diteliti yaitu, 1 orang Kanit III Si Gar Subdit Gakkum Ditlantas Polda Riau, 1 orang Baur Tilang Ditlantas Polda Riau, dan 3 orang Masyarakat Terkena E-Tilang Mobile.

#### 1. Komunikasi

Salah satu bentuk dari komunikasi yang dilakukan oleh pihak Ditlantas Polda Riau untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang adalah elektronik tilang ini adalah dengan cara mensosialisasikan baik turun langsung ke jalan ataupun dengan cara menyebarkan informasi melalui media social seperti di akun instagram resmi Ditlantas Polda Riau @ditlantas\_poldariau dan di akun facebook @Ditlantas Polda Riau. Disana telah diinformasikan tentang adanya tilang dengan elektronik canggih atau bias disebut dengan elektronik tilang yang mana petugas dapat memotret pelanggaran secara langsung baik terlihat ataupun tidak oleh pelanggaran.

Terkait sosialisasi program elektronik tilang mobile ke masyarakat. BRIPKA REANDY THYO, selaku Baur Tilang Ditlantas Polda Riau menyatakan bahwa :

“Bentuk sosialisasi ke masyarakat itu sebelum elektronik tilang mobile ini terbit. Jadi sebelum dilaksanakannya etle mobile ini kami sosialisasikan dulu, pertama kali kita sosialisasikan ke media massa, surat kabar, iklan tv, dan baru sosialisasi langsung ke masyarakat dengan cara membagikan brosur-brosur, sosialisasikan ke sekolah-sekolah SMA karena banyak anak SMA yang sudah menggunakan motor, selain itu tempat-tempat perbelanjaan, bis transmetro”. (Wawancara pada Kamis, 16 November 2023)

Terkait dengan sosialisasi kepolisian dengan masyarakat, masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui adanya program elektronik tilang mobile, maka masyarakat harus mengetahui adanya etle mobile. berikut adalah hasil wawancara dengan beberapa masyarakat yang ditilang terkait sosialisasi etle mobile salah satunya yaitu karyawan swasta mengatakan bahwa :

“Sebelumnya mana tau klau ada proram elektronik tilang mobile ini, karena kena tilang itu lah jadi tahu”. (Wawancara pada Senin, 20 November 2023)

## 2. Sumber Daya

Kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia ialah kunci dari keberhasilan proses pelaksanaan sebuah kebijakan. Sumber daya pendukung dalam menunjang keberhasilan sebuah pelaksanaan itu dapat berupa sumber daya manusia (SDM), fasilitas atau teknologi yang mendukung proses pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam pelaksanaan Elektronik Tilang HandHeld Mobile di Kota Pekanbaru studi pada (Ditlantas Polda Riau) ini terdapat beberapa instansi atau pelaksana serta fasilitas pendukung dalam penerapannya. Sebagai hasil wawancara dengan informan yaitu Bapak IPTU HOKMAL SUHARTONO, selaku anggota Gakkum Lalu Lintas Polda Riau :

“kita ketahui bahwa untuk sarana dan prasarana alat penerapan ini hanya berupa alat yang beroperasi diluar ruangan dan kapan saja dapat terjadi eror system atau hilang koneksi jaringan. Ini juga merupakan salah satu kendala bagi pihak kepolisian yang harus lebih diperhatikan dalam penerapan pelaksanaan ETLE Mobile, karena penerapan pelaksanaan ini dapat mempermudah petugas dalam melakukan penilangan.”(Wawancara pada kamis, 16 November 2023)

## 3. Sikap (Disposisi) Pelaksanaan

Sikap pelaksanaan dapat dilihat dari dukungan atau penolakan dari pelaksana sebuah kebijakan yang dapat mempengaruhi terlaksananya pelaksanaan suatu kebijakan. Yang mana keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan program ETLE Mobile dapat

dipengaruhi dari dukungan atau penolakan dari pelaksana itu sendiri. Sikap (disposisi) dari pelaksana terkait pelaksanaan program ETL E Mobile pada tilang ini. Berikut adalah salah satu bentuk pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh petugas kepolisian kepada masyarakat pengguna jalan raya.

#### 4. Karakteristik Badan Pelaksana

Karakteristik badan pelaksana meliputi organisasi formal maupun organisasi informal. Yang mana didalam pelaksanaan kebijakan program etle mobile yang selaku organisasi formal seperti kepolisian, pengadilan, kejaksaan dan bank sedangkan organisasi informal nya yaitu seperti masyarakat yang terkena tilang dengan elektronik. Seperti yang telah disebutkan dalam pelaksanaan etle mobile ini terdapat beberapa badan yang terlibat yaitu, kepolisian, pengadilan, kejaksaan yang memiliki perannya masing-masing dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dalam pengurusan etle mobile. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak BRIPKA REANDY THYO, selaku Baur Tilang Ditlantas Polda Riau :

“Kalau untuk ETL E Mobile tentu saja terkhusus pada direktorat lalu lintas atau kepolisian, kejaksaan, lalu dari kejaksaan ke pengadilan, dan juga semua polsek sudah menerapkan e-tilang, karna dia memakai aplikasi khusus, yang dari kita tilang lalu kita masukkan data nanti akan keluar notifikasi di hp pelanggar.” (Wawancara pada Kamis, 16 November 2023)

Kemudian mengenai instansi yang terkait, Bapak IPTU HOKMAL SUHARTONO, selaku anggota Gakkum Lalu Lintas Polda Riau juga menambahkan bahwa :

“ Untuk instansi yang pertama kali terkait itu ada kepolisian, Bank BRI, kantor kejaksaan, kantor pengadilan. Mulai dari pihak kepolisian melakukan penilangan, lalu masyarakat membayar denda ke bank, kalo sudah nantinya pelanggar akan jumpai petugas lagi untuk meminta berkas yang ditilang.” (Wawancara pada Kamis, 16 November 2023)

Selain tiga instansi diatas, pihak bank juga terlibat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan e-tilang. Yang mana dalam hal ini juga terdapat di dalam PERMA No 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas bahwa pengadilan bersama dengan kepolisian dan kejaksaan adalah lembaga yang diberikan amanat untuk menyelenggarakan pengadilan perkara pelanggaran lalu.

Dari hasil wawancara diatas, maka terdapat dukungan terhadap jalannya elektronik tilang mobile. Petugas sudah melaksanakan tugasnya sesuai SOP nya. Petugas juga sudah bekerja dengan aplikasi, dan tidak melakukan penyelewengan karna dengan adanya elektronik tilang mobile ini dapat mengurangi pungli atau penyelewengan yang kerap terjadi di tilang manual sebelumnya.

#### 5. Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik

Keberhasilan atau kegagalan dari sebuah pelaksanaan kebijakan juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal yaitu lingkungan social, ekonomi, dan politik. Hal ini disebabkan lingkungan eksternal yang tidak kondusif dapat menyebabkan kegagalan pada sebuah kebijakan dan keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan itu dipengaruhi pada factor lingkungan yang kondusif akan menyebabkan kegagalan pada pelaksanaan sebuah kebijakan dan keberhasilan sebuah pelaksanaan itu dapat dipengaruhi oleh factor

lingkungan yang kondusif. Maka, lingkungan ekonomi, social dan politik sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan etle mobile di Kota Pekanbaru.

Dengan kondisi ekonomi masyarakat yang berbeda-beda bisa mempengaruhi pelaksanaan program etle mobile yang mana hal ini terkait denda tilang yang dijatuhkan ke pelanggar (masyarakat). Berkaitan dengan pengaruh kondisi ekonomi, Bapak IPTU HOKMAL SUHARTONO, selaku anggota Gakkum Lalu Lintas Polda Riau juga mengatakan bahwa :

“kalau dari masyarakat mengeluh karena denda tilangnya mahal, masyarakat wajib membayar denda karena denda tilang itu sudah langsung tertera dan denda tilang itu berbeda-beda tiap pasal yang mereka langgar. Jika mengeluh karena denda membayar, itukan jadi efek jera dari Negara, kami Polisi hanya sebagai petugas hokum”. (Wawancara pada Kamis, 16 November 2023)

Dengan demikian, kondisi ekonomi masyarakat yang berbeda-beda tidak mempengaruhi denda tilang yang ditetapkan. Karena ini merupakan efek jera agar masyarakat tidak mengulangi pelanggarannya lagi, dan juga kepada masyarakat diharapkan dapat memperhatikan keselamatan, keamanan dan kenyamanan dalam berkendara di jalan raya sehingga terciptanya masyarakat yang tertib dalam berlalu lintas. polisi hanya melakukan tugasnya dalam menegakkan hokum dalam berlalu lintas dan tidak terkait penentuan jumlah denda tilang yang dijatuhkan dengan kata lain polisi hanya menjatuhkan denda tilang sesuai aturan atau pasal yang dilanggar. Jika dilihat dari segi social, denda tilang denda tilang dapat berpengaruh pada tingkat kepatuhan masyarakat.

Dari hasil wawancara diatas, tingkat pelanggaran dan kepatuhan di pekanbaru sudah cukup baik dengan adanya etle mobile, hal ini sejalan dengan denda tilang yang cukup besar sehingga menciptakan masyarakat yang mulai tertib meskipun pelanggaran masih tetap ada namun hal ini sudah berkurang. Terkait kondisi politik, sebelum etle mobile dilaksanakan sering terjadi penyelewengan dalam pengurusan tilang seperti istilahnya damai ditempat ataupun pungutan liar. Hal ini menjadikan citra polisi menjadi buruk dimata masyarakat, namun dengan adanya etle mobile ini diharapkan hal tersebut dapat terhindar sehingga menciptakan citra polisi baik dimata masyarakat.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan elektronik tilang berdasarkan dalam penelitian ini yaitu pada dasarnya pihak Kepolisian Lalu Lintas Polda Riau menjelaskan yaitu dalam aspek fungsi dan tujuan dalam penerapan etle mobile terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Pekanbaru berdasarkan fungsi pada sistem elektronik tilang secara sederhana yaitu untuk mempermudah proses tilang, dan pada kenyataannya memang mempermudah pihak kepolisian dalam melaksanakan proses tilang. Dan berdasarkan tujuannya pihak kepolisian bertujuan untuk mendisiplinkan pengemudi agar dapat meminimalisir pelanggaran ataupun tingkat kecelakaan, dan mengurangi interaksi polisi dengan pengemudi agar tidak terjadinya kemacetan. Artinya sistem etle mobile sudah berfungsi dan bertujuan sebagaimana mestinya. Dengan pola tilang etle mobile ini dapat diharapkan lebih baik.

2. Dalam hal yang menjadi kendala saat diberlakukannya etle mobile di Kota Pekanbaru pada Ditlantas Polda Riau ini, berdasarkan teori maupun wawancara yang sudah di teliti terdapat berbagai kendala yaitu salah satu hal penyebab kendala ini berdasarkan factor sarana dan prasarana, masyarakat dan kebiasaan sudah menjadi kendala utama penerapan pelaksanaan etle mobile itu sendiri di berbagai titik lokasi wilayah Ditlantas Polda Riau maupun di berbagai kota lainnya. Maka pihak kepolisian sdah lebih lanjut dan melakukan pergerakan untuk penyebab kendala yang ada seperti kendala berdasarkan factor sarana dan prasarana itu memiliki keterbatasan dan untuk memuat di setiap daerah, maka kepolisian sudah memikirkan terhadap solusi yang sudah dilakukan seperti membuat rancangan anggaran kepada setiap wilayah daerah, kemudian kendala factor masyarakat yang memiliki perilaku tidak taat terhadap peraturan lalu lintas dan factor budaya yang

Berdasarkan analisis teori yang diperoleh dilapangan maupun teori para ahli diatas, maka penulis mengemukakan beberapa saran terhadap penerapan dan kendala E-Tilang bagi pelanggar tidak menggunakan helm di jalan raya yaitu sebagai berikut :

1. Kepada pihak Kepolisian Khususnya Ditlantas Polda Riau dalam menerapkan E-Tilang ini dalam menciptakan ketaatan berlalu lintas khususnya dalam penggunaan helm saat berkendara pada dasarnya tidak semudah membalikkan telapak tangan, disamping perlunya kesadaran masyarakat, ketegasan dari aparat penegak hokum dalam hal ini petugas Kepolisian sangat diperlukan dalam menegakan peraturan yang ada. Maka dengan itu pihak kepolisian yang memegang untuk sangat tegas dan disiplin agar dalam penerapan etle mobile dapat berjalan sebagaimana mestinya.
2. Dan dalam kendala berjalannya etle ini sudah diberikan solusi yang ada didalam pembahasan. Seperti kendala masyarakat dengan solusi agar pihak kepolisian lebih memperhatikan masyarakat juga dengan cara bersosialisasi, dan agar tidak berlanjutnya kebiasaan yang buruk masyarakat, dari pihak kepolisian tidak menurunkan siaga dengan kata lain polisi juga tetap bertugas melakukan pemantauan di titik lokasi bukan hanya kamera pemantau saja.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku dan Jurnal:**

- Andry, H., & Yussa, T. (2020).Perilaku & Etika Administrasi Publik.Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Badu, SQ., & Djafri, N. (2017).Kepemimpinan & Perilaku Organisasi. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publikedisi kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Fauzi, & Irviani, R. (2018).Pengantar Manajemen. Yogyakarta: Andi
- Hamim, S. (2019).Organisasi Birokrasidan Manajemen Pemerintahan. Pekanbaru: UIR Press
- Maksudi, B. I. (2017). Dasar-Dasar Administrasi Publik Dari Klasik Ke Kontemporer. Depok: Rajawali Press
- Nurcholis, H. (2007). Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah. Jakarta: PT Grasindo.

- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah.
- Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan

Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.

- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi.
- Hamim, S. (2005). Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). Perilaku dan Etika Administrasi Publik. *Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing*.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan

Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.

- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Stretegi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Muliando, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.

- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163–175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogya, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.

- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.

- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia* (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori

Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".

- Yunisman, Y., Salioso, H., Febrianto, S., Prayuda, R., & Mardatillah, A. (2022). Analysis of quality of animal health services by veterinary medical and veterinary paramedic services in food security and agricultural agency of Rokan Hilir Regency. *International Journal of Health Sciences*, 14(3), 1030-1046.
- Larasati, D., Indrastuti, S., Salioso, H., Yussa, H. A., & Suri, D. M. (2022). Analysis of the effect of job satisfaction and job motivation on the performance of cleaning officers at the environmental service agency Rokan Hilir district Indonesia. *International Journal of Health Sciences*, 6(4), 573-588.
- Salioso, H. (2016). ASN, OTDA, Politik Pilkada Serentak dan Korupsi di Indonesia. *SISI LAIN REALITA*, 1(1), 01-07.
- Adha, M. L., & Salioso, H. (2024). KINERJA ORGANISASI DI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BASARNAS KELAS A PEKANBARU. *JURNAL KEMUNTING*, 5(1), 1-16.
- Askarial, A., Rinaldi, K., & Salioso, H. (2016). Kota Dumai Dalam Pidato Seorang Walikota.
- Priansa, D. J., & Garnida, A. (2019). Manajemen Perkantoran. Bandung: Alfabeta.
- SISTEM INFORMASI MANAJEMEN. (2021). (n.p.): Penerbit Widina.
- Supomo, R. (2018). Pengantar Manajemen. Bandung: YRAMA WIDYA.
- Syafri, W. (2012). Studi tentang Administrasi Publik. Jakarta: Erlangga.
- Wedayanti, M. D. (2018). Manajemen Corporate Sosial Responsibility. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Zulkifli, & Yogia, M. A. (2014). Fungsi-Fungsi Manajemen (Suatu Bacaan Pengantar). Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Wayne Parsons, (2008). Public Policy (Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan). Jakarta: Kencana.
- Amirrulloh, Budiono, 2004. Pengantar Manajemen. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anggara, Sahya, 2012. Ilmu Administrasi Negara. Jakarta; Pustaka Setia.
- Handoko, T.Hani, 2003. Manajemen. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Rahman, M. A., Amarullah, R., & Hidayah, K. (2020). Evaluasi penerapan model pembelajaran e-learning pada pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(1), 101-116.
- Wibowo, N. W., Aminanto, M. E., & Yola, L. (2022). Evaluasi Penerapan E-Policing dalam Program Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) di Ruas Jalan Margonda Raya Kota Depok. *FOCUS*, 3(2), 164-172.

### **Regulasi:**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara

Maya Suttri

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.